

## ABSTRAK

Perubahan sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ternyata belum membawa perubahan yang mewujudkan sistem pembinaan yang bersifat membangun kepribadian bagi setiap narapidana. Belum berjalannya sistem pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 menimbulkan beberapa permasalahan.

Untuk itu permasalahan yang diajukan dalam penelitian Skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah sistem pembinaan narapidana menurut Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan? (2) Bagaimanakah pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Medan? (3) Bagaimanakah Peran lembaga pemasyarakatan serta hambatan yang dihadapi dalam pembinaannarapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Medan?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan didukung oleh observasi, data hasil wawancara dengan informan, dan studi dokumentasi. Sedangkan alat pengumpulan data yang dipergunakan berpedoman pada wawancara dan studi dokumentasi, dan hasil penelitian dianalisis dengan cara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan wanita medan belum terlaksana secara optimal sesuai dengan isi Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebabkan beberapa hal antara lain : kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, sarana dan prasarana serta Undang-undang yang mengatur tentang pembinaan narapidana wanita belum ada secara khusus. Selain itu masih kurangnya perhatian pemerintah kota dan daerah Sumatera Utara dalam hal peningkatan pembinaan warganya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu disarankan agar lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan perannya dalam pembinaan narapidana menggunakan pendekatan persuasif dan pemberian pembinaan agar sepenuhnya mengikuti apa yang diatur dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan dalam hal pemberian pembinaan, pihak lembaga pemasyarakatan perlu mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.

**Kata Kunci: Peran Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan, Narapidana Wanita.**

## **ABSTRACT**

*In the framework of improving the development of the detainees in the Women Penitentiary Class IIA Medan, the government has issued various policies. Skill development is one of the characteristics of the Women Penitentiary Class IIA Medan. This is an empirical normative study with sociological juridical approach. The data for this study were obtained through distributing questionnaires and interview. The data collected were then qualitatively analyzed.*

*The result of this study reveals that the development program for the detainees has not optimally implemented because of several reasons such as inadequate qualified human resources, facilities and infrastructures, the absence of law which especially regulates the development of women detainees that the existing law should be improved, and the city government of Medan and the provincial government of Sumatera*

*It is suggested that city government of Medan, the provincial government of Sumatera Utara and the central government improve the human resources or the staff serving for the Women Penitentiary through the provision of training and motivation and the development of facilities and infrastructures. Besides, the Women Panitentiary Class IIA Medan should continuously look for work associates to meet the objective of development such as to form the detainees to be real men who realize their mistakes, correct themselves, and never do the same criminal act they did before that they can be accepted by their community, actively play their role in development and live naturally as good and responsible citizen.*

***Key Words: Development, Law on Panitentiary, Detainees***